

Pembelajaran dari Penyelenggaraan Pemilubersih.org

Apakah masyarakat membutuhkan pelaksanaan pemilu yang bersih, tak ternodai berbagai pelanggaran, sehingga bisa menjadi kontes pemilihan politisi-politisi yang benar-benar melayani mereka? Jika ya, barangkali bisa disimpulkan bahwa masyarakat akan mudah digerakkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan mengadakan berbagai pelanggarannya, dan situs seperti Pemilubersih.org ataupun Matamassa.org tidak akan kesulitan mencari sukarelawan yang siap melaporkan kecurangan pemilu.

Namun, meskipun kita berada dalam era paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia, kita masih menyaksikan pelaksanaan pemilu yang pekat dengan berbagai jenis pelanggaran. Sementara pelaporan pelanggaran masih minimal. Matamassa.org yang selain mengundang partisipasi masyarakat juga menjalin kerja sama dengan 200 sukarelawan untuk menjaga rutinitas pelaporan hanya mampu mendapatkan 420 laporan dari seluruh Indonesia. Sementara Pemilubersih.org yang sepenuhnya mengandalkan partisipasi anak muda tanpa ikatan kerja sama apapun mendapatkan 127 pengaduan.

Rendahnya pengaduan ini bisa karena berbagai alasan. Yang jelas ini bukan dikarenakan rendahnya minat masyarakat pada persoalan politik. Di media sosial banyak pengguna Internet sangat aktif menunjukkan pilihan politiknya. Bahkan tak jarang, media sosial menjadi ajang pertarungan pengaruh antar-pendukung dari politisi atau partai politik yang berbeda. Barangkali yang menyebabkan rendahnya partisipasi warga sebagai pelapor kecurangan pemilu, karena jauh lebih banyak dari mereka yang justru menjadi kepanjangan kepentingan dari tokoh politik pilihannya. Mereka tidak memosisikan diri sebagai konsumen politik yang dengan jeli meneliti, memilah dan memilih tawaran-tawaran para politisi. Banyak dari mereka menjadi pendukung fanatis tokoh politik yang dipilihnya, dan menjadi pengawas sekaligus menjadi penyebar berita kecurangan ataupun kabar buruk mengenai pesaing dari tokoh pilihannya. Sikap seperti ini menjadikan dukungan ataupun penolakan tanpa kekritisian. Yang didukung harus selalu tampak baik, yang ditolak harus selalu tampak buruk.

Dalam konteks sosial seperti inilah Pemilubersih.org mencoba mengambil peran memfasilitasi pengaduan warga terhadap kecurangan pemilu. Situs web ini diharapkan mendapat sambutan warga

yang menginginkan pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur dan adil. Situs ini diharapkan bisa menggantikan peran media sosial yang sejauh ini hanya menjadi saluran pelampiasan kekecewaan tetapi tanpa tidak lanjut dan tanpa akumulasi pelaporan yang sistematis.

Laporan pembelajaran (*lesson learned*) ini ditulis untuk mengupas alasan-alasan yang mendasari mengapa harapan di atas tidak terpenuhi. Apa yang dilaporkan disini merupakan pengembangan dari apa yang didiskusikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak yang memiliki pengalaman serupa ataupun kepentingan yang sama dengan SatuDunia.

Merebut Perhatian Publik

Pemilu adalah peristiwa periodik terpenting dalam kehidupan berbangsa. Bangsa ini mempertaruhkan, setidaknya-tidaknya, masa lima tahun ke depan kepada para politisi pilihannya. Sepanjang penyelenggaraan pemilu ini berbagai pihak – politisi, partai politik, media, pengamat, dan lain-lainnya – aktif menarik perhatian publik, bisa saling berebut, bisa juga saling melemahkan daya tarik pesaingnya terhadap publik. Spanduk, baliho, iklan di radio, televisi ataupun koran meramaikan seluruh penjuru negeri. Para politisi habis-habisan mencurahkan waktu, tenaga, dan bahkan dana yang tidak sedikit untuk memikat masyarakat. Industri media juga harus mengerahkan segenap strateginya agar bisa menjadi rujukan utama masyarakat yang ingin mengetahui suhu dan cuaca politik nasional.

Dalam riuhnya lalu-lalang informasi politik seperti ini bagaimana Pemilubersih.org bisa dikenali publik. Sebelum memutuskan kesediaan berpartisipasi dalam Pemilubersih.org, tentu masyarakat harus mengenalnya lebih dahulu. Bisa jadi banyak orang yang menganggap pengaduan kecurangan melalui Internet ini penting dan sebenarnya bersedia berpartisipasi juga, namun karena mereka tidak mengetahui keberadaan Pemilubersih.org merekapun tidak menjadi sukarelawan.

Jadi, membuat publik mengenal Pemilubersih.org adalah langkah yang harus terlebih dahulu dilakukan SatuDunia sebelum mengajak anak muda atau pemilih awal (*early voters*) sebagai relawan. Hambatan yang harus dihadapi oleh SatuDunia dalam melakukan hal ini adalah sebagai berikut.

1. Terbatasnya waktu dan sumber daya untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Pemilubersih.org diluncurkan ke publik pada Maret 2014, sehingga waktu yang tersedia untuk mensosialisasikan dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi sangatlah singkat. MataMasa diluncurkan Desember 2013 saja, dengan dukungan jaringan dan pengalaman AJI Jakarta, hanya mendapat 420 pengaduan, maka jumlah pengaduan sebesar 127 di Pemilubersih.org bukanlah capaian

yang mengecewakan mengingat sejauh ini bisnis utama SatuDunia adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bukan sesuatu yang terkait dengan pemilu ataupun politik.

2. Terbatasnya dukungan dari pihak luar. Dengan keterbatasan sumber daya, SatuDunia mencoba menggalang bantuan *buzzer*, atau tokoh yang populer di media sosial khususnya di kalangan anak muda, namun yang bersedia digandeng SatuDunia hanya satu selebritas, yakni Melani Subono.
3. Perubahan komunitas yang disasar. AJI Jakarta meluaskan cakupan sasaran Matamassa.org yang pada saat pileg hanya meliputi Jakarta dan sekitarnya menjadi tujuh kota di Indonesia pada saat pilpres. Ini menyebabkan tumpang tindih dengan cakupan Pemilubersih.org yang meliputi lima kota. Karena itu SatuDunia kemudian menggeser sasarannya ke segmen anak muda, yang merupakan segmen paling akrab dengan Internet, dan lebih memiliki keleluasaan waktu untuk melakukan kegiatan sukarela dibandingkan kelompok usia lainnya. Namun, perubahan segmen sasaran ini juga berarti perubahan pendekatan komunikasi dan tugas baru untuk mensosialisasikan kegiatan ini pada anak muda. Penyesuaian situs sudah dilakukan agar lebih menarik anak muda, namun sosialisasi ke kerumunan anak muda hanya sempat dilaksanakan dua kali, di Bandung dan Bali. Admin Twitter untuk mengkomunikasikan hal ini juga sudah diganti oleh anak muda agar komunikasinya lebih nyambung.
4. Keterbatasan sumber daya untuk mempromosikan diri ini membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak untuk saling memuat tautan dan mempromosikan. Ini terutama perlu dilakukan dengan lembaga-lembaga resmi yang dampaknya bukan hanya meningkatkan keterpaparan masing-masing situs, tetapi juga meningkatkan legitimasinya sehingga bisa lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Budaya Politik

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan perlu dilihat dari perspektif budaya nasional. Kecurangan dalam pemilu tidak dipahami secara sama oleh semua pihak bahwa hal ini adalah kecurangan. Kecurangan dalam pemilu berbeda dengan tindakan kriminal yang pelanggaran moralnya relatif mudah dipahami oleh setiap orang. Orang yang tidak tahu isi KUHP pun bisa mengerti bahwa mencuri atau merampok itu salah. Namun, aturan-aturan dalam pemilu adalah sesuatu yang baru, yang bisa jadi secara intuitif tidak langsung dipahami orang tentang kebaikannya. Misalnya,

larangan kampanye di tempat ibadah bagi sebagian orang sulit dimengerti, karena, menurut mereka, pemilu adalah urusan kepentingan banyak orang, dan komunitas agama juga harus memperhatikan kepentingan banyak orang.

Demokrasi sendiri adalah praktik dan nilai baru, yang masih masih asing dan harus diperjuangkan agar bisa diterima oleh segenap masyarakat. Kebanyakan anggota masyarakat hanya mengenal namanya namun tidak norma-norma yang mendasari pelaksanaannya. Demokrasi tidak memiliki akar kuat dalam tradisi politik bangsa kita. Baru sesudah memasuki era reformasi tahun tahun 1998, bangsa kita bisa berpolitik tanpa dominasi kelompok tertentu. Bahwa kemudian secara formal demokrasi diterima sebagai keniscayaan politik, ini karena demokrasi dianggap cara terbaik untuk mengelola kepentingan beragam suku bangsa agar mereka tetap bisa bersatu dalam NKRI tanpa harus menjadi seragam.

Masyarakat yang beragam tidak serta merta menjadi demokratis, bahkan ketika secara formal mekanisme demokrasi diadopsi. Namun, dalam konteks perkembangan politik saat ini “prospek demokratisasi meningkat seiring dengan berkembangnya pusat dan kuasa dan pluralitas wacana publik di masyarakat” (Hefner, 1999, hal. 158). Ini karena “multiplisitas gagasan dan otoritas membuat sulit bagi satu kelompok tunggal untuk memenangkan monopoli kuasa secara jelas.” Akibatnya pemberbagian kuasa merupakan kompromi alamiah dari kelompok-kelompok yang bersaing ini. Jadi demokrasi bisa dianggap sebagai solusi pragmatis ketika tak ada satupun yang dominan ataupun bisa meyakinkan seluruh orang.

Demokrasi pragmatis seperti ini baru merupakan upaya menengahi benturan kepentingan antar-kelompok yang bersaing. Sementara praktik dalam kelompok sendiri sering masih belum demokratis. Sehingga terjadilah demokrasi tanpa demokrat, karena sistem kenegaraannya demokratis, namun warganya tidak demokratis. Mekanisme utama di dalamnya pun, yakni pemilu, diselenggarakan dalam rangka mengkuantifikasi kekuatan klaim perwakilan. Dengan pemilu klaim perwakilan menjadi jelas kuantitasnya, bahwa benar seorang politisi mewakili sekian orang.

Mengubah demokrasi sebagai penengah perselisihan antar-kelompok menjadi demokrasi sebagai penyaluran aspirasi individu membutuhkan pembelajaran kolektif yang panjang. Demokratisasi akan menguat ketika warga semakin terinformasi mengenai persoalan-persoalan publik dan terlibat aktif dalam praktik kewarga-negaraan (*citizenship*). Walaupun politisi telah mengambil alih keputusan publik, namun warga tetap menyimak dan menilai apakah politisi benar-benar memperjuangkan

kepentingannya. Kepentingan warga tidak lagi dianggap statis terkungkung dalam pengelompokan tradisional, seperti suku, lokasi geografis, dan agama, tetapi lebih pada kepentingan-kepentingan aktual, di mana warga menyadari kepentingan mereka dan siapa yang memperjuangkan kepentingan tersebut. Mereka tidak lagi memilih berdasarkan identitas-identitas besar dan menyerahkan kepentingannya sepenuhnya didefinisikan oleh elit yang dianggap mewakili identitas tersebut. Karena itu dalam demokrasi, fragmentasi sosial dimungkinkan terjadi dan tidak dianggap ancaman, karena keterwakilan warga merujuk pada keterwakilan kepentingan, bukan identitas.

Bangsa kita baru pada tahap demokrasi antar-kelompok, belum demokrasi antar-individu. Umumnya masing-masing kelompok kurang bisa menerima keragaman. Mengikuti pandangan Hofstede mengenai dimensi budaya, maka masyarakat kita adalah masyarakat yang kolektivitasnya dan jarak kuasanya (*power distance*) tinggi. Ini membuat keragaman internal kelompok tidak hanya sulit diterima, tetapi juga sulit muncul karena yang suaranya menentukan adalah yang berada di puncak piramida sosial, apakah hak bersuara tersebut diperoleh karena jabatannya, pengetahuannya, ataupun usianya.

Dalam konteks budaya politik seperti demikian, Pemilubersih.org ditujukan pada anak muda atau pemilih pemula. Karena itu tantangan yang merintanginya partisipasi mereka dalam pengaduan kecurangan adalah sebagai berikut.

1. Mendidik anak muda bahwa kecurangan pemilu adalah pelanggaran yang serius, yang merusak dan mengancam demokrasi, yang bisa menjatuhkan kualitas lembaga parlemen atau pemerintahan kita. Anak muda, terutama yang masih duduk di bangku SLTA, umumnya apolitis, sehingga tidak mudah mengajak mereka memperhatikan persoalan politik secara serius. Sementara yang duduk di bangku kuliah bisa sangat aktif mempraktikkan kewarganegaraannya. Mahasiswa secara kolektif dan lintas-kampus kerap menjadi aktor penting dalam – terutama pergolakan – politik nasional. Namun, aktivitas mereka umumnya adalah aktivitas kolektif, yang secara sosial bisa menggairahkan mahasiswa yang tidak membaca berita-berita politik sekalipun untuk terlibat. Sedangkan kegiatan pelaporan ini lebih merupakan kegiatan individual.
2. Pengaduan kecurangan pemilu bukanlah tindakan biasa yang mudah dilakukan orang. Ada tanggung jawab dan konsekuensi yang tidak semua orang bersedia menanggungnya. Salah satu risiko yang mungkin dihadapi pelapor adalah dia harus menghadapi banyak orang, misalnya

pendukung caleg atau parpol. Meskipun yang dilaporkan adalah perorangan, tetapi orang tersebut bisa mengklaim mewakili kelompok tertentu, sementara pelapor tidak mewakili siapa-siapa. Sehingga bisa terjadi persoalan pengaduan ini ditarik menjadi persoalan antara individu dengan kelompok. Namun, dalam pelaksanaannya risiko ini tidak dilihat oleh anak-anak muda yang mengadukan kecurangan pemilu di situs Pemilubersih.org. Walaupun diberikan pilihan untuk menyembunyikannya identitasnya, mereka semuanya memilih menunjukkan diri mereka. Tapi, ini tidak berarti anak-anak muda mengabaikan risiko tersebut, kurang jumlah yang berpartisipasi dalam pengaduan kecurangan ini adalah sangat kecil dibandingkan yang tidak.

Kelembagaan Pemantauan

Masyarakat yang saat ini demokratis pun pernah mengawali ketika demokrasi masih asing bagi budaya mereka. Namun, dengan rancangan kelembagaan yang mengikat atau memaksa secara bertahap norma-norma demokrasi terinternalisasikan dalam budaya mereka. Struktur rancangan kelembagaan, seperti kapasitasnya dalam mengizinkan dan mendengarkan partisipasi warga, akan mempengaruhi kesediaan maupun jenis partisipasi warga (Goodin, 1996).

Masifnya pelanggaran yang terjadi antara lain karena penerapan sanksi terhadap pelanggar masih lemah. Bawaslu sendiri sudah berupaya menggalang 1 juta relawan dari kalangan mahasiswa untuk diturunkan sebagai pengawas. Namun, sejauh ini tidak ada pemberitaan mengenai dampak dari gerakan tersebut.

Dalam kondisi lemahnya penegakan pengawasan SatuDunia menghadapi tantangan-tantangan sebagai berikut.

1. Sulitnya memastikan bahwa partisipasi mereka akan memberi dampak yang berarti. Kepuasan relawan adalah jika mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar ditindak-lanjuti dan memberi pengaruh yang berarti. Sebagaimana disampaikan Irham dari AJI Jakarta selaku pengelola Matamassa.org, partisipan merasa puas jika yang dilakukannya berdampak nyata. Orang yang diadakan melakukan pelanggaran dalam memasang spanduk, kemudian menurunkan spanduk tersebut. Namun, besarnya dampak ini juga ditentukan tingkat penegakan aturan. Tindak lanjut dari laporan melalui Pemilubersih.org tidak hanya tergantung pada SatuDunia, tetapi pada pihak lain, dalam hal ini Bawaslu.
2. Rancangan aturannya pengaduan sangat membatasi pelaporan. Aturan yang ada hanya memberi

waktu paling lama tiga hari sesudah kejadian dianggap terlalu singkat dan membatasi partisipasi warga. Apa lagi dalam rentang waktu tersebut saksi juga harus bersedia dipanggil datang untuk mengkonfirmasi.

3. Pelaporan juga bisa berisiko pada si pelapor, sementara aturan perlindungan pelapor juga belum ada.
4. Dari penyelenggaraan pemilu yang sudah terjadi tampak bahwa Bawaslu kewalahan dalam melakukan pengawasan, karena sangat masifnya tindak pelanggaran. Untuk mengefektifkan pengawasan Bawaslu perlu menggalang kerjasama, bahkan lebih efektif lagi jika bersedia berbagi tugas dengan lembaga-lembaga lain, yakni lembaga-lembaga lain melaporkan pelanggaran, sementara Bawaslu bertugas menindak-lanjuti atau melakukan *follow-up*.

Komitmen Online vs Komitmen Offline

Aktivitas politik di dunia maya sudah banyak dikaji secara ilmiah. Internet, lebih-lebih media sosial, kerap dianggap sebagai media yang efektif untuk memobilisasi massa untuk tujuan politik tertentu. Keberhasilan *Arab Spring* di Tunisia maupun di Mesir menumbangkan diktator yang telah berkuasa dalam jangka waktu yang lama kerap dihubungkan dengan keberhasilan penggunaan media sosial. Dari kajiannya terhadap Facebook, Twitter, YouTube dan berbagai situs Web Howard *et al.* (2011) menemukan bahwa (i) media sosial memainkan peran utama dalam membentuk debat politik selama berlangsungnya *Arab Spring*, (ii) percakapan revolusioner secara daring (*online*) kerap mendahului kejadian besar di dunia nyata, dan (iii) media sosial membantu penyebaran gagasan demokratis lintas batas antar-bangsa.

Di Indonesia, media sosial juga menjadi media bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan dan sikap politiknya. Jika di media arus utama, misalnya televisi dan koran, masyarakat hanya menonton politisi dan pakar menyampaikan pendapatnya. Di media sosial masyarakat bisa menjadi politisi ataupun pengamat politik. Internet membuat warga semakin terinformasi, bahkan berlimpah informasi sampai melampaui kemampuannya mencerna informasi tersebut. Namun, keberlimpahan informasi ini tidak identik dengan meningkat kekritisan seseorang. Bahkan di Internet berita yang salah (*hoax*) pun bisa dengan mudah bersirkulasi dan dipercaya banyak orang. Di media sosial, setiap orang juga leluasa menentukan pilihan kelompok yang tidak lagi identik dengan pengelompokan secara geografis. Hal ini berdampak pada dua hal. Pertama, interaksi menjadi semakin

mudah, tidak dibatasi oleh jarak, dan menurut Feenberg (2002, hal. 92), “setiap teknologi yang meningkatkan kontak manusia memiliki potensi demokratis” (Feenberg, 2002, hal. 92). Kedua, secara geografis, intensitas interaksi di dunia maya ini menyebabkan masyarakat di tingkat geografis menjadi terfragmentasi. Masing-masing individu dalam satu lingkungan geografis menjadi lebih terhubung dengan orang lain yang bisa saja tinggal di luar lingkungan tersebut. Fragmentasi ini meningkatkan keragaman pandangan dalam suatu lingkungan dan bisa mengurangi dominasi pandangan tertentu (Hefner, 1999). Di satu sisi hal ini bisa mendorong demokratisasi, namun bisa juga menyebabkan keretakan sosial yang melemahkan modal sosial dari masyarakat.

Banyak laporan yang memandang optimis tentang peran Internet atau media sosial dalam mendorong pembangunan demokrasi. Namun, apakah setiap upaya memanfaatkan Internet untuk mendorong demokratisasi akan selalu disambut antusias oleh warga. Nyatanya baik [Pemilubersih.org](#) ataupun [Matamassa.org](#) hanya diakses oleh sedikit orang dari total seluruh warga Indonesia.

Memobilisasi orang untuk melakukan tindakan maya, apa lagi jika hanya tinggal mengklik tombol “like” atau “yes”, relatif sangat mudah. Pengorbanan yang diminta terhadap mereka tidak besar, tinggal mengklik saja. Tetapi untuk menjadi sebuah gerakan sosial atau politik, dibutuhkan komitmen yang besar, bahkan termasuk siap menghadapi risiko. Karena itu gerakan seperti ini hanya bisa terlaksana jika ditopang oleh ikatan yang kuat antar-banyak aktivisnya.

Menurut Malcolm Gladwell (2010), aktivitas daring di media sosial dibangun di atas ikatan sosial yang lemah. Kenalan maya ini bisa menjadi sumber gagasan atau informasi, dan Internet memungkinkan kita mengeksploitasi kekuatan dari hubungan yang lemah yang menghubungkan banyak orang dalam jarak yang berjauhan sekalipun. Hubungan semacam ini sangat ampuh dalam mendifusikan inovasi, kerja lintas disiplin, pertemuan pembeli dan penjual, namun sulit untuk menjadi dasar aktivisme yang berisiko tinggi. Untuk menjadikan media sosial memiliki dampak pada perubahan sosial di dunia nyata perlu orang yang bersedia menerjemahkan apa yang terjadi secara maya menjadi aktivitas di dunia nyata. Aktivitas penerjemahan ini membutuhkan waktu, uang dan bahkan risiko. Tanpa penerjemahan ini aktivitas di dunia nyata hanyalah permainan wacana.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam [Pemilubersih.org](#) bisa dikarenakan hal-hal berikut.

1. Pengaduan kecurangan bukanlah semata-mata tindakan daring (*daring*), tetapi juga menuntut tindakan luring (*offline*), dan memiliki konsekuensi luring pula. Relawan harus turun melihat langsung pelanggaran, baru menuliskan laporannya. Tindakan daring lebih mudah

dilakukan, karena bisa dilakukan di suatu ruangan yang aman dan nyaman. Sementara tindakan luring menuntut relawan keluar dari ruangnya, apakah untuk melihat pelanggaran dan memotretnya, ataupun menerima panggilan sebagai saksi. Buat banyak orang tindakan dan konsekuensi luring ini berat.

2. Penerjemahan aktivitas daring menjadi aktivitas di dunia nyata. Agar aktivitas yang ada di Pemilubersih.org ini memiliki dampak nyata minimal SatuDunia harus melakukan kerja sama (MOU) dengan Bawaslu dan lembaga-lembaga lain, dan memastikan bahwa segala laporan di situs ini akan ditindak-lanjuti. Ini masih membutuhkan upaya panjang, karena Bawaslu sendiri nampak kesulitan untuk memproses laporan-laporan melalui saluran konvensionalnya.

Pembelajaran

Kegiatan dalam Pemilubersih.org adalah inovasi asing dalam lingkungan sosial yang baru belajar berdemokrasi. Dalam proses demokratisasi yang menyulitkan adalah banyak pihak tidak berkepentingan untuk belajar berdemokrasi, mereka lebih berkepentingan untuk memenangkan kepentingan politisnya. Karena itulah situs ini tak termanfaatkan secara optimal karena berada dalam lingkungan budaya, politik dan kelembagaan yang belum sepenuhnya akomodatif bagi pengawasan. Ketidak-optimalan ini menyingkapkan persoalan-persoalan yang membutuhkan baik pembenahan undang-undang atau peraturan dan pendidikan publik berkenaan dengan pelanggaran pemilu.

Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengoperasian situs ini, SatuDunia yang kompetensi utamanya adalah pengembangan TIK harus masuk dalam lingkungan baru yang belum akrab. Ini membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Dan, karena donor juga memiliki program-program lain yang terkait, maka SatuDunia ataupun pihak lain dalam program terkait, perlu memahami gambar besar (*big picture*) yang dimiliki donor. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengintegrasikan kepingan-kepingan yang membentuk gambar besar ini. Selain itu untuk mengoptimalkan sumber daya, kerja sama dengan pihak lain yang donornya berbeda juga diperlukan. Lebih-lebih dalam kerja pengawasan di mana persoalannya terlalu besar untuk bisa diselesaikan hanya oleh beberapa LSM saja.

Daftar Pustaka

Feenberg, A. (2002). *Transforming Technology: A Critical Theory Revisited*, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Goodin, R. (1996) *The Theory of Institutional Design*, Cambridge: Cambridge University Press.

Hefner, R.W. (1999). Civic Pluralism Denied? The New Media and *Jihadi* Violence in Indonesia. In D.F. Eickelman & J.W. Anderson (Eds), *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. New York: McGraw-Hill.

Howard, P.N., Duffy, A., Freelon, D., Hussain, M., Mari, W., & Mazaid, M. (2011). Opening Closed Regimes: What Was the Role of Social Media During the Arab Spring? In *Project on Information Technology & Political Islam*. Retrieved from: http://pitpi.org/wp-content/uploads/2013/02/2011_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-Mazaid_pITPI.pdf